

## **ABSTRAK**

Geriana Yossy Haullussy (01656180036)

### **ANALISIS YURIDIS NORMA PADA PERATURAN PEMERINTAH NO. 103 TAHUN 2015 YANG MENGATUR MENGENAI JANGKA WAKTU HAK PAKAI ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 (UUPA) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011**

(xv + 103 halaman)

Keberadaan orang asing yang menetap di Indonesia pasti menimbulkan perbuatan hukum termasuk tanah untuk tempat tinggal mereka. Pemberian hak atas tanah bagi orang asing dan badan hukum asing di Indonesia dalam bentuk Hak Pakai diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015. Pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai salah satu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan hierarki yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktriner, data yang digunakan data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan. Metode pendekatan yang dilakukan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute Approach*) dan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai jangka waktu pemberian Hak Pakai atas tanah bagi orang asing yang tinggal di Indonesia pada Peraturan Pemerintah No 103 Tahun 2015 diatur dalam Pasal 6 dan 7 menimbulkan perbedaan yang merugikan WNI dan hal ini bertentangan dengan UUD 1945 dan UUPA. Pembentukan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015 adalah sebagai pelaksana dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) sehingga ketidaksesuaian dengan UUPA dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 membuktikan bahwa PP tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga harus dianggap cacat hukum.

Referensi : 40 (1982 – 2017)

Kata Kunci : Hukum Agraria, Hak Atas Tanah, Hak Pakai Atas Tanah Bagi Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia

## **ABSTRACT**

Geriana Yossy Haullussy (01656180036)

### **JUDICIAL ANALYSIS OF RULES ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 103 YEAR 2015 REGULATING REGARDING THE TERM OF LAND USE RIGHTS FOR FOREIGN CITIZENS IN INDONESIA IS REVIEWED FROM LAW NUMBER 5 YEAR 1960 (UUPA) AND LAW NUMBER 12 YEAR 2011**

(xv + 103 pages)

The presence of foreigners living in Indonesia would have led to legal action including land for their residence. The granting of land rights for foreigners and foreign legal bodies in Indonesia in the form of Rights set forth in Government Regulation No. 103 of 2015. Establishment of Government Regulations as one of the rules of the law should conform to the hierarchy set forth in Law No. 12, 2011. This research is a type of normative juridical research or doctrinal law research, the data used are secondary data obtained from the library. The method used is the method of approach to law (statute approach) and data analysis using qualitative methods with drawing conclusions using deductive logic. The results of the study indicate that the regulation concerning the time period for granting lands use rights to foreigners living in Indonesia in Government Regulation No. 103 year 2015 is regulated in Articles 6 and 7, causing differences that are detrimental to Indonesian citizens and this is contrary to the 1945 Constitution and the UUPA. Formation of Government Regulation No. 103 year 2015 is the executor of Law No. 5 of 1960 (UUPA) so that the non-conformity with UUPA and Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution proves that the Government Regulation (PP) is contrary to Law No. 12 year 2011 concerning Formation of Regulations so that it must be considered as legal defect.

References : 40 (1982 – 2017)

Keywords : Agrarian Law, Land Rights, Land Use Rights for Foreigners Domiciled in Indonesia